

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memerlukan kehadiran warga dunia yang paripurna. Begitupun dengan bangsa Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai penggerak pembangunan. Dalam era globalisasi sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, oleh karena itu dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang terampil dan profesional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan salah satu lembaga yang mencetak tenaga kerja mempunyai tanggung jawab dalam mempersiapkan dan membekali calon tenaga kerja dengan sebaik-baiknya.

Begitu pula dengan pendidikan yang disesuaikan dengan zaman yang kian modernisasi karena hasil pemikiran dan karya cipta dari manusia sehingga kita sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Bangsa yang ingin maju, membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakatnya tentu mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa karena pendidikan merupakan wujud kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat agar dapat bersaing secara sehat dengan prinsip untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk kualitas suatu bangsa dan kemajuan negara yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan agar dapat

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak suatu bangsa. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan membentuk watak suatu bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka dalam proses pembelajaran hendaklah kita mengukur kadar ketercapaian kurikulum di jenjang sekolah, khususnya yang mencakup tujuan dan isi melalui suatu penilaian terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik apakah sudah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau belum sesuai dengan standar nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang sering dianggap sebagai salah satu dari tiga pilar utama yang sangat menentukan kegiatan pembelajaran. Ketiga pilar tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Apabila ketiga pilar tersebut sinergis dan berkesinambungan, maka akan sangat menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sistem penilaian harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan strategis dengan model pembelajaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disebutkan:

Citra Melia Dewi, 2017

KONTRIBUSI PENILAIAN DIRI DAN ANTAR TEMAN UNTUK MENINGKATKAN CIVIC DISPOSITION DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Dengan demikian, adanya penilaian dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatannya, guru dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran. Dengan menelaah pencapaian tujuan pembelajaran melalui penilaian, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya kepada peserta didik. Sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui penilaian ini merupakan umpan balik (*feed back*) terhadap proses pembelajaran. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, proses pembelajaran akan terus dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Penilaian yang akan dikaji berkenaan dengan penilaian sikap di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sikap dapat menentukan keberhasilan seorang peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar. Dalam Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan kompetensi lulusan untuk tingkat SMA dalam ranah sikap, sebagai berikut:

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis

pendidikan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan kompetensi inti untuk tingkat SMA kelas X-XI dalam ranah sikap sebagai berikut:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Semua guru harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam merancang program pembelajaran, satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, guru harus memperhatikan karakteristik afektif peserta didik melalui penilaian sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual.

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 ”penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan ,proses dan keluaran pembelajaran”. Sedangkan dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 menyebutkan bahwa:

Penilaian pembelajaran dengan *Problem Based Learning* dilakukan dengan *authentic assesment*. Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan yang sistematis pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang dianalisis untuk melihat kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam pendekatan *Problem Based Learning* dilakukan dengan cara evaluasi diri (*self assesment*) dan *peer/assesment*.

Self assesment. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri terhadap usaha-usahnya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai (*standard*) oleh peserta didik itu sendiri dalam belajar.

Peer assesment . penilaian di mana pebelajar berdiskusi untuk memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukannya sendiri maupun oleh teman dalam kelompoknya.

Berdasarkan paparan diatas penulis menggunakan salah satu komponen dalam *civic disposition* antara lain kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian berhubungan dengan penilaian autentik karena dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 menyebutkan bahwa:

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba dan membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karenanya, penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di SMA.

Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidikan, dan sebagainya. Dalam penilaian sikap, objek sikap yang dapat dinilai dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Winarno, 2013, hlm. 222), sebagai berikut:

1. Sikap terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.
2. Sikap terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan oleh guru tersebut.
3. Sikap terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

Penilaian sikap sangat penting dalam proses pembelajaran, namun dalam kenyataannya penilaian sikap kurang dilaksanakan oleh para guru. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chotimah (2010, hlm. 2) ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru pendidikan di SMP diketahui pada umumnya mereka menilai hasil belajar peserta didik dengan menggunakan tes

dan lebih menekankan pada aspek pengulangan pengetahuan (aspek kognitif) yang menekankan pada aspek pengulangan materi dengan cara mengingat atau menghafal sejumlah konsep, walaupun sesungguhnya mereka menyadari bahwa untuk menilai aspek afektif dan psikomotor tidaklah relevan jika hanya menggunakan tes. Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa mereka menyadari betul sesungguhnya masalah afektif dirasakan sangat penting. Akan tetapi, kenyataannya dapat dikatakan hampir sebagian besar guru tidak menilai dominan afektif, yang ada hanyalah penilaian yang dilakukan tanpa acuan yang jelas dan dianggap sudah menilai secara tidak terstruktur dan terencana. Pada mata pelajaran tertentu kadang penilaian afektif dilaksanakan pada akhir pelajaran maupun ada juga pada saat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi kebanyakan guru tidak melaksanakan penilaian afektif pada saat proses belajar mengajar.

Keadaan tersebut sejalan dengan hasil temuan Hasan (2010, hlm. 3), yang mengungkapkan bahwa penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap materi pokok hanya diorientasikan pada aspek kognitif dengan taksonomi tingkat rendah, yaitu melalui tugas-tugas Lembar Kerja Siswa (LKS), ulangan harian, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Hal ini berakibat pada pencapaian aspek kompetensi afektif dan psikomotorik tidak maksimal sehingga untuk mengukur pencapaian peserta didik pada kompetensi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada umumnya guru menggunakan instrumen penilaian yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai konsep-konsep tertentu tanpa disertai tagihan lain yang lebih komprehensif.

Penilaian pembelajaran lebih menekankan pada hasil yang cenderung hanya menilai kemampuan aspek kognitif. Sementara, penilaian dalam aspek afektif dan psikomotorik seringkali diabaikan dan belum terealisasi dengan baik. Akibatnya rendahnya kualitas sopan santun dan tanggung jawab peserta didik karena penilaian yang dilakukan umumnya terfokus pada kegiatan yang menyangkut prestasi akademik sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah banyak yang dilingkupi oleh persoalan rendahnya kualitas sikap yang baik.

Pencapaian kompetensi afektif serta penilaiannya kurang mendapat perhatian semestinya dalam sistem pendidikan di Indonesia selama ini. Hal-hal yang bersikap afektif yang berkaitan dengan emosi, olah rasa, sikap bahkan moralitas, tampaknya dianggap tidak memiliki relevansi langsung dengan tuntutan zaman. Akibatnya, tidak mengherankan jika potret lulusan sekolah tidak jarang menampilkan sisi buram dalam aspek afektif, seperti lemahnya sopan santun dan budi pekerti, kurang disiplin, terjadinya perkelahian (tawuran) antarpelajar, merebaknya kenakalan dan kriminal, kurang tumbuhnya rasa kemanusiaan dan empati, melemahnya semangat kebangsaan, renggangnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Anwar (1997) tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan bahwa:

Pola mengajar yang dilakukan guru lebih bersifat pemberian pengetahuan, disamping suasana dan situasi pengajaran kurang mengarah pada pembentukan sikap peserta didik. Guru belum membina sikap dan perilaku peserta didik. Guru belum membina sikap dan perilaku peserta didik secara nyata. Pada kenyataan ini diberitakan sering terjadinya perkelahian (tawuran) antarpelajar yang membawa korban jiwa dan kurangnya disiplin terhadap peraturan lalu lintas, walaupun pada hakikatnya banyak faktor yang mempengaruhi perilaku peserta didik (keluarga, masyarakat maupun sekolah). Oleh karena itu, paling tidak Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk lebih berperan dalam membentuk perilaku peserta didik.

Berdasarkan penelitian Santrock (dalam Muchtar, 2010, hlm. 71), kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa sistem penilaian yang dilakukan baik oleh guru, sekolah dan bahkan oleh pemerintah tetap menggunakan penilaian tradisional, yaitu memberikan sejumlah soal dengan jawaban pendek, isian atau pertanyaan pilihan ganda dan meniai sejumlah tugas terbatas yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini juga cenderung hanya mengungkap aspek kognitif, bahkan kognitif tingkat rendah, yaitu aspek ingatan dan pemahaman. Kecenderungan pelaksanaan penilaian tradisional ini pada dasarnya terlalu menyederhanakan kapasitas peserta didik selaku pembelajar karena potensi-potensi yang dikembangkan dan hasil belajarnya tidak sepenuhnya diungkap, apalagi jika penilaian hanya terbatas pada

pengungkapan kemampuan kognitif aspek ingatan dan pemahaman yang hanya mengandalkan memori semata.

Masalah-masalah semacam itulah yang dialami dalam penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak menilai aspek kognitif. Jadi seandainya peserta didik berhasil baik dalam tes kognitifnya berarti mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa peserta didik itu mempunyai penghayatan yang baik dan dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang sejalan dengan apa yang telah diketahuinya itu.

Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah juga kebanyakan kurang mendapat perhatian dari peserta di sekolah juga kebanyakan kurang mendapat perhatian dari peserta didik, bahkan sering dianggap mata pelajaran yang kurang menarik karena kebanyakan guru Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan penilaiannya pada aspek kognitif. Peserta didik secara terus menerus diberikan stimulus (rangsangan) berupa materi dengan menghafal atau mengingat konsep yang telah dibahas yaitu bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menguasai materi tersebut.

Oleh karena itu, agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, maka penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup ketiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Budimansyah (2009) bahwa kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar, sebagai berikut:

Pendidikan kewarganegaraan secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang didasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepribadian dan pedoman perilaku masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan menggunakan

Citra Melia Dewi, 2017

KONTRIBUSI PENILAIAN DIRI DAN ANTAR TEMAN UNTUK MENINGKATKAN CIVIC DISPOSITION DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penilaian tersebut maka akan meningkatkan watak kewarganegaraan yang merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang meliputi sikap dan tingkah laku seseorang sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialaminya, seperti jujur, tanggung jawab, disiplin diri, kepedulian, kesopanan, kerjasama, kemauan untuk mendengar, dan bentuk sikap lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan Torney Purte dan Vermeer (dalam Winarno, 2013, hlm. 176) bahwa “*civic disposition (motivations for behavior and values/attitudes), such as support for justice and equality and a sense of personal responsibility*”. Pernyataan tersebut dapat diartikan watak kewarganegaraan meliputi motivasi untuk memiliki rasa tanggung jawab diri.

Dengan demikian, watak kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Sebagaimana yang dirumuskan dalam *Center for Indonesian Civic Education* (dalam Winataputra, 2007) bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan mereflesikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Budimansyah (dalam Hasan, 2010, hlm. 6) mengemukakan bahwa penilaian yang digunakan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus menerapkan prinsip penilaian proses dan hasil. Oleh karena itu, tujuan penilaian proses adalah mencari umpan balik (*feedback*) untuk memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung. Penilaian hasil dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai penguasaan atau pencapaian hasil belajar peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu.

Penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kekhasan berkenaan dengan karakteristik bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu karakteristik pendidikan Kewarganegaraan adalah “*value based education*” (Daryono, 2008, hlm. 13), yaitu pendidikan berbasis nilai, artinya suatu usaha sadar

untuk menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik sehingga peserta didik bisa bersikap dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan penilaian tersebut, maka diharapkan adanya penilaian sikap dan mengukur kemampuan afektif peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai moral yang terdapat pada dirinya sehingga selalu mengaplikasikan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya penelitian mengenai kontribusi penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* khususnya dalam pembelajaran PPKn di sekolah di tingkat SMA. Penulis memilih kelas XI sebagai kelas penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **KONTRIBUSI PENILAIAN DIRI DAN ANTAR TEMAN UNTUK MENINGKATKAN *CIVIC DISPOSITION* DALAM PEMBELAJARAN PPKn**”. Penulis melakukan penelitian Studi Deskriptif di Kelas XI SMAN 18 Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan guru dalam penyelenggaraan penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn ?
2. Bagaimana proses dan objektivitas penilaian diri siswa dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn?
3. Bagaimana kontribusi penilaian diri siswa dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn?
4. Bagaimana peningkatan *civic disposition* dalam penilaian diri dan antar teman?
5. Bagaimana kelebihan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan *self assesment* untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn?

C. Tujuan Penelitian

Citra Melia Dewi, 2017

KONTRIBUSI PENILAIAN DIRI DAN ANTAR TEMAN UNTUK MENINGKATKAN *CIVIC DISPOSITION* DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn di sekolah.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan guru dalam penyelenggaraan penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses dan objektivitas penilaian diri siswa dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn
- c. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penilaian diri siswa dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn
- d. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan *civic disposition* dalam penilaian diri dan antar teman
- e. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan *self assesment* untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn

D. Manfaat penelitian

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

1. Dari Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan dan kajian pendidikan kewarganegaraan khususnya yang berkaitan dengan kontribusi penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* pada pembelajaran PPKn.

2. Dari Segi Kebijakan

Citra Melia Dewi, 2017

KONTRIBUSI PENILAIAN DIRI DAN ANTAR TEMAN UNTUK MENINGKATKAN CIVIC DISPOSITION DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kebijakan formal dalam belajar dan pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Selain itu memberikan informasi kepada setiap pendidik terkait kontribusi penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* pada pembelajaran PPKn di sekolah.

3. Dari Segi Praktik

Manfaat secara praktis dapat diperoleh baik oleh penulis maupun pembaca dan juga bagi banyak pihak terlebih dalam bidang pendidikan. Manfaat dari penelitian diharapkan dapat dirasakan oleh banyak pihak, diantaranya:

- a. Bagi Penulis
 - 1) Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca
 - 2) Dapat dijadikan sebagai media latihan untuk diterapkan oleh penulis ketika kelak menjadi pendidik
- b. Bagi guru PPKn
 - 1) Memberikan informasi kepada guru yaitu untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan siswa dalam penilaian dirinya
 - 2) Kesempatan untuk mengembangkan suatu sistem penilaian
 - 3) Sebagai tambahan ilmu bagi guru untuk menjelaskan pada siswanya apa yang diinginkan siswa dalam suatu pembelajaran.
- c. Bagi siswa
 - 1) Memberikan informasi bagi siswa untuk meningkatkan pengertian tentang nilai pribadi
 - 2) Siswa dapat lebih menghargai penilaian orang lain terhadap dirinya
 - 3) Sebagai salah satu sarana untuk lebih mengenal kemampuan dirinya sendiri.
- d. Bagi sekolah
 - 1) Memberikan manfaat bagi sekolah yaitu diharapkan menjadi rekomendasi bagi sekolah untuk mengetahui kontribusi penilaian diri dan antar teman untuk meningkatkan *civic disposition* dalam pembelajaran PPKn di sekolah

- 2) Mendukung terwujudnya pembelajaran bermakna sebagai upaya terwujudnya sekolah yang berkualitas serta dapat memberikan referensi bagi para peneliti.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi berisi rincian mengenai urutan dari setiap bab dan bagian bab dalam seluruh penulisan skripsi, yang terdiri dari bab satu sampai bab terakhir, yaitu bab lima. Adapun rincian urutan dari setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I sebagai pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab II sebagai kajian pustaka, akan dipaparkan mengenai teori-teori yang mendukung terhadap masalah yang akan dikaji.

Bab III Metode Penelitian

Bab III berisi paparan secara rinci mengenai pendekatan dan metode penelitian, termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta analisis data: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab IV sebagai hasil penelitian dan pembahasan, akan dijelaskan mengenai deskripsi data hasil penelitian, serta pembahasan dari analisis data yang ditemukan penulis di lapangan.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab V ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti di lapangan. Bab ini berisi mengenai simpulan-simpulan yang diambil dari analisis data secara keseluruhan, serta berisi mengenai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

Citra Melia Dewi, 2017

**KONTRIBUSI PENILAIAN DIRI DAN ANTAR TEMAN UNTUK MENINGKATKAN CIVIC DISPOSITION
DALAM PEMBELAJARAN PPKn**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu